

**POLA KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM
PENGELOLAAN KAMPUNG TRIDI DI KOTA MALANG**

SKRIPSI



STEPHANIA L. BAGO

2015210066

**KOMPETENSI MANAJEMEN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG**

2020

RINGKASAN

Setiap daerah memiliki potensi wisata berupa wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan jenis lainnya. Tempat wisata merupakan salah satu tempat hiburan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki potensi wisata yang berbeda yang dapat dikelola dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas hiburan dan rekreasi. Apalagi kontribusi kawasan rahasia dan rakyat pada umumnya yang dikembangkan sesuai dengan standar good administration yang akhir-akhir ini berubah menjadi pola mendunia seperti model pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemitraan publik-swasta digunakan untuk mengelola Desa Tridi di Malang serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat kerjasama antara sektor publik dan swasta. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Dalam eksplorasi ini, jenis informasi yang akan dikumpulkan adalah informasi esensial dan opsional. Informasi penting dalam penelitian ini diperoleh dari pengurus Kota Tridi (ketua RT/RW, karang taruna, dan afiliasi kelurahan), ketua Kesatrian Kota, Kelurahan Blimbing, Kota Malang, Dinas Perjalanan, dan Warga Tridi. Secara bersamaan, informasi opsional dalam penelitian ini berasal dari studio rekaman. Metode pengumpulan informasi dalam penelitian ini adalah persepsi, pertemuan semi-terorganisir, dan studio rekaman. Peneliti mengacu pada sejumlah tahapan dalam analisis data: penurunan informasi, penyajian informasi, dan akhir. Hasil temuan menunjukkan bahwa pola kerjasama pemerintah-swasta dalam pengelolaan Desa Tridi di Kota Malang adalah konjugat, dengan pemerintah mendapat bantuan modal dari pihak swasta yaitu PT. Indana untuk membantu penguatan daerah setempat. PT. Sebagai bagian dari Program Corporate Social Responsibility (CSR), Indana membantu mengecat Kampung Tridi di Kota Malang untuk meningkatkan potensinya sebagai destinasi wisata. Variabel pendukung yang mempengaruhi contoh organisasi publik dan konfidensial dalam penyelenggaraan Kota Tridi di Kota Malang adalah kerjasama yang dinamis dari kelompok masyarakat Kota Tridi dan hubungan yang luar biasa antara PT. Bersama Masyarakat Desa Tridi, Indana. Faktor penghambatnya adalah kemajuan yang jelas, keterbatasan modal untuk membuat objek wisata, dan tidak adanya hubungan baik antara Dinas Perjalanan dan Kota Tridi.

Kata Kunci : Kampung Tridi, Pemerintah, Perusahaan, Pola Partnership

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu industri terpenting suatu bangsa adalah pariwisata. Dengan adanya industri perjalanan tersebut, suatu negara atau lebih tegasnya Pemerintah Provinsi tempat tujuan wisata tersebut ditemukan mendapat bayaran dari gaji setiap objek industri perjalanan tersebut. Industri perjalanan merupakan potensi industri perjalanan yang dimiliki oleh setiap daerah, baik industri perjalanan biasa, industri perjalanan sosial maupun industri perjalanan palsu, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki kemungkinan industri perjalanan yang berbeda yang dapat diselidiki, ditangani, diawasi dan dibuat untuk mengatasi masalah kerabatnya untuk pengalihan atau kantor olahraga (Kurniawan, 2013).

Peningkatan dalam industri perjalanan merupakan area potensial yang harus diciptakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Christie dan Crompton (2013) yang menyatakan bahwa pariwisata berpotensi menjadi alat pembangunan, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, mendorong diversifikasi ekonomi, membantu pengentasan kemiskinan, dan menjalin hubungan timbal balik dengan negara lain. sektor produksi dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki potensi wisata yang beragam yang dapat digali dan dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana hiburan, rekreasi keluarga, dan lapangan kerja di sekitar tempat wisata.

Pariwisata memiliki potensi untuk berkembang, menumbuhkan apresiasi yang lebih besar terhadap tanah air dan pengakuan budaya. Dari bidang industri

travel juga bisa menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari retribusi, biaya pemberhentian dan tiket atau bisa mendapatkan perdagangan asing dari wisatawan yang berkunjung. Kehadiran industri perjalanan juga akan mengembangkan bisnis keuangan di sekitar daerah wisata dan mendukung aktivitas mereka sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. “Dalam hal ini, sebagian besar kesimpulan tentang dampak pengembangan pariwisata adalah bahwa dampak ekonomi sebagian besar dianggap positif,” seperti dikemukakan Kemal (2012). Ini menandakan "untuk situasi ini, sebagian besar keputusan tentang efek peningkatan industri perjalanan adalah bahwa efek moneter dipandang sebagai yang terbaik".

Betapa pentingnya kawasan industri perjalanan sehingga dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan kerjasama atau asosiasi melalui metodologi yang berbeda dengan asosiasi industri perjalanan yang ada, yang terdiri dari: Pemerintah, kawasan rahasia, dan kawasan setempat serta pihak-pihak terkait yang diharapkan. untuk dapat membantu kelanjutan pengembangan industri perjalanan di sekitarnya. Menurut Sjamsuddin (2016), organisasi dapat dibentuk jika memenuhi kebutuhan berikut:

1. Setidaknya ada dua pertemuan, khususnya otoritas publik, area rahasia dan area lokal.
2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan bersama dalam administrasi.
3. Dalam pengelolaan pariwisata, ada kesepakatan antara pemerintah dan swasta yang dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar.

4. Dalam pengelolaan pariwisata, pemerintah, swasta, dan masyarakat memainkan peran yang saling menguntungkan.

Kemajuan signifikan yang dapat dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah adalah kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah daerah. Selain itu, prinsip good governance yang akhir-akhir ini menjadi trend global atau mode of governance pada umumnya sejalan dengan partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan.

Tata kelola pemerintahan yang baik menggarisbawahi bahwa penyelenggaraan administrasi negara memerlukan keselarasan antara kerjasama dan kontribusi antara otoritas publik, dunia usaha (confidential area), dan masyarakat (common society). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling mendasar dan meningkatkan layanan, strategi kemitraan publik-swasta (disebut juga kemitraan publik-swasta) dianggap sangat penting. Keterlibatan sektor swasta dalam urusan publik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar perkotaan dan meningkatkan layanan untuk memenuhi kebutuhan paling dasar masyarakat mengingat kemampuan Pemerintah yang terbatas, baik dari segi keuangan maupun sumber daya manusia.

Salah satu tempat wisata di Kota Malang yang saat ini "populer" di Kota Malang sebagai tempat berfoto adalah Kota Tridi yang terletak di Jalan Temenggungan Ledok, Kota Kesatrian, Kawasan Blimbing, Kota Malang. Kampung Tridi yang dulu kumuh kini tak lagi kumuh. Pemikiran dan inovasi dari asosiasi pemuda lingkungan dan imajinatif lainnya yang tidak disetujui oleh kaum

muda telah mengubah kota ghetto menjadi Kota 3D. Mengingat konsekuensi persepsi, data diperoleh dari salah satu perintis daerah setempat bahwa proyek Kota Tridi disubsidi dari uang tunai, karena cadangan yang terbatas tidak semua kota dapat dicat, namun demikian, Decofresh, sebagai salah satu organisasi, melihat pemikiran imajinatif dan kerja keras yang telah diselesaikan oleh remaja. Decofres, seorang pelukis kenamaan Malang, juga pernah berkarya melukis kampung warna-warni di Desa Jodipan. Kemitraan dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan (partisipasi) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan antara pihak-pihak yang bermitra, khususnya antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, diperlukan dalam situasi seperti ini. Berkaitan dengan hal tersebut, para pakar tertarik pada ujian unggulan bertajuk "Yayasan Perhimpunan Publik dan Rahasia Dalam Pemerintahan Kota Tridi Kota Malang

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan organisasi publik dan rahasia dalam penyelenggaraan Kota Tridi di Kota Malang?
2. Apa saja unsur-unsur yang membantu dan mencegah terjadinya perkumpulan umum dan rahasia dalam penyelenggaraan Kampung Tridi di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penyelenggaraan pemerintahan dan perkumpulan rahasia dalam penyelenggaraan Kota Tridi di Kota Malang.

2. Mengetahui variabel-variabel yang membantu dan merusak contoh perkumpulan umum dan rahasia dalam penyelenggaraan Kampung Tridi di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara umum, temuan studi ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk studi-studi selanjutnya, khususnya tentang kerjasama pemerintah-swasta.

2. Keuntungan yang Wajar

Manfaat yang wajar dari pemeriksaan ini adalah dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan kontribusi terhadap kewenangan publik dan rahasia daerah dalam penyelenggaraan Kota Tridi di Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, AS. 2018 *Kampung Tematik DAS Brantas, Etalase Pembangunan atau Fenomena Sesaat*. diakses melalui <https://www.malangpost.com/netizen/opini/kampung-tematikdas-brantas-etalase-pembangunan-atau-fenomena-sesaat> tanggal 25 Mei 20 November 2019.
- Basuki, Ananto dan Shofwan. 2006. *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*. Malang, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa (SPOD) FEUB.
- Christie Iain T. and Crompton Elizabeth. 2013. *Republic of Madagascar: Tourism Sector Study Africa Region Working Paper Series No. 63*
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Ragam Model Bisnis Kemitraan Pemerintah-Swasta: Sebuah Kunci Sukses Pengembangan E-Government di Indonesia, Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia*, Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung.
- Irianti, Ana Frida. 2011. *Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Pariwisata*. Universitas Brawijaya. Malang, Skripsi yang tidak dipublikasikan.
- Kemal, Mustafa. 2012. *Host Perceptions of Impacts A Comparative Tourism Study. Annals of Tourism Research*, Vol. 29, No. 1, pp. 231–253, Elsevier Science Ltd. All rights reserved. Printed in Great Britain.
- Kumar, Sasi dan C. Jayasankar Prasad. 2004. “*Public-Private Partnerships in Urban Infrastructure*”. Dalam *Kerala Calling*, edisi Februari.
- Kurniawan F. dkk., 2013. *Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Pada Tirta Wisata Kabupaten Jombang)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1, No.1.
- Mahmudi. 2007. *Kemitraan Pemerintah Daerah dan Efektivitas Pelayanan Publik. Sinergi*, Vol. 9 No. 1, Januari 2007 Hal.55.
- Marsiatanti, Dyah Yusi. 2011. *Sinergi Antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Melestarikan Kesenian Daerah*. Universitas Brawijaya. Malang, Skripsi yang tidak dipublikasikan.
- Ministry of Municipal Affairs. 1999. *Public-Private Partnership: A Guide for Local Government*. British Columbia.
- Muchtar dkk. 2013. *Kemitraan Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam Pelayanan Publik (Studi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 5, Hal. 1048-1057.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 *Tentang Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.*
- Purmada, dkk. 2016. *Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Community Based Tourism* (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*|Vol. 32 No. 2 Maret 2016.
- Sjamsuddin, S. 2016. *Kepemerintahan dan Kemitraan.* Malang: Agritek YPN. Malang.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: PT Alfabet.
- Sumarto dan Hetifa Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good governance.* Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Tri Widodo W. 2008. *Pengembangan Kerjasama/Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat dan Swasta Dalam Pembangunan Daerah*, Makalah disampaikan sebagai Bahan Diskusi Penelitian “Pola Kemitraan Antara Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah di Kalimantan”, PKP2A III LAN Samarinda.
- Uji AYT. 2015. *Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pembangunan Bandara Swadaya Sangia Nibandera Kabupaten Kolaka.*